

# PERAN MASYARAKAT KOREA SELATAN DALAM MEMPENGARUHI UPAYA REKONSILIASI ISU *COMFORT WOMEN* ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN

Fitrah Firdanis Maharasra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram

## ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai upaya masyarakat Korea Selatan dalam memperjuangkan rekonsiliasi isu *Comfort Women* antara Jepang dan Korea Selatan. Isu *Comfort Women* berawal dari berakhirnya perang dunia pertama dimana banyak tentara Jepang mengalami trauma dan stres pasca perang, stres yang dialami oleh para tentara Jepang memicu terjadinya tindak pemuasan hasrat seksual terhadap warga sipil di Jepang. Guna menjaga nama baik dan mengurangi korban seksual warga sipil, pemerintah Jepang memfasilitasi para tentara Jepang yang mengalami stres pasca perang dengan menculik wanita dari Negara yang pernah diduduki Jepang pada masa perang dunia pertama. Wanita-wanita yang diculik untuk dijadikan sebagai pekerja seksual tentara Jepang ini kemudian dikenal dengan sebutan *Comfort Women* atau dalam Bahasa Jepang disebut *Jugun Ianfu*. Korea Selatan sebagai salah satu Negara yang pernah diduduki oleh Jepang menjadi Negara dengan korban *Comfort Women* terbanyak dengan total 80% dari jumlah wanita yang dijadikan sebagai *Comfort Women* oleh Jepang. Banyaknya korban *Comfort Women* dari Korea Selatan, menjadi alasan pemerintah Korea Selatan untuk menuntut permohonan maaf dan tanggung jawab dari pihak Jepang. Meski telah disepakati beberapa perjanjian terkait isu ini, masih terdapat banyak masyarakat yang menuntut keadilan atas isu ini hingga mencapai proses rekonsiliasi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder dari literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Penulis juga menggunakan literatur berupa buku, artikel, berita dan majalah sebagai sumber data dalam menulis penelitian ini. Isu rekonsiliasi *Comfort Women* memiliki baSSnyak aktor yang berperan di dalamnya, salah satunya ialah masyarakat Korea Selatan yang terus mengupayakan terwujudnya rekonsiliasi antara pihak Korea Selatan dan Jepang untuk menyelesaikan isu *Comfort Women*.

Kata Kunci : Comfort Women, Rekonsiliasi, Jepang, Korea Selatan

## **ABSTRACT**

*This research provides an overview of the efforts of the South Korean people in fighting for reconciliation on the issue of Comfort Women between Japan and South Korea. The issue of Comfort Women began with the end of the first world war where many Japanese soldiers experienced post-war trauma and stress. The stress experienced by Japanese soldiers triggered acts of satisfying sexual desires against civilians in Japan. In order to maintain its good name and reduce sexual victims of civilians, the Japanese government facilitated Japanese soldiers who were experiencing post-war stress by kidnapping women from countries that had been occupied by Japan during the first world war. The women who were kidnapped to serve as sexual workers for the Japanese army became known as Comfort Women or in Japanese called Jugun Ianfu. South Korea, as one of the countries once occupied by Japan, is the country with the most victims of Comfort Women with a total of 80% of the number of women used as Comfort Women by Japan. The large number of Comfort Women victims from South Korea is a reason for the South Korean government to demand an apology and responsibility from Japan. Even though several agreements have been agreed regarding this issue, there are still many people who demand justice on this issue until a reconciliation process is achieved. This research is descriptive qualitative in nature and uses secondary data from literature related to the issues studied. The author also used literature in the form of books, articles, news and magazines as data sources in writing this research. The Comfort Women reconciliation issue has many actors playing a role in it, one of which is the South Korean people who continue to strive for reconciliation between South Korea and Japan to resolve the Comfort Women issue.*

*Keywords : Comfort Women, Reconciliation, Japan, South Korea*

## PENDAHULUAN

Kasus *Comfort Women* terjadi pada masa kedudukan Jepang di semenanjung Korea Selatan pada tahun 1910 dan terus berlangsung selama periode perang dunia kedua (Utami, 2023). Isu ini muncul karena Pemerintah Jepang melihat masalah mendesak yang bisa menjadi penyebab kekalahan Jepang dalam perang apabila tidak segera diatasi. Kelemahan yang ditunjukkan tentara Jepang pada saat itu adalah masalah stres yang dialami akibat perang dan mereka pun melampiaskannya dengan cara memaksa wanita-wanita di negara Jepang untuk melakukan hubungan seksual (Adityani, 2018). Pemerintah Jepang yang sudah melihat bahaya yang dapat ditimbulkan bagi identitas negara mereka jika para tentara Jepang terus menerus melakukan hal ini kepada warga negara mereka sendiri, efeknya akan menimbulkan rasa tidak percaya oleh rakyat Jepang kepada para tentara yang membela tanah air mereka (Jennifer, 2020). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Jepang mulai mencari solusi agar tingkat stres tentara Jepang dapat segera diatasi namun juga tidak menimbulkan bahaya krisis kepercayaan terhadap militer oleh rakyat Jepang, maka pada saat itu pemerintah Jepang menyediakan *Comfort Women* yang menjadi solusi dalam menangani masalah tersebut (Utomo, 2022).

Penculikan perempuan Korea Selatan yang akan dijadikan *Comfort Women* dimulai saat Jepang melakukan aneksasi di semenanjung Korea, di sana mereka menculik perempuan Korea Selatan dengan cara ditawarkan pendidikan dan pekerjaan sebelum diangkat menggunakan kendaraan para tentara Jepang, setelah itu mereka dimasukkan ke dalam gerbong kereta yang bertujuan mengangkut mereka menuju rumah bordil yang tersebar di seluruh negara yang diduduki oleh Jepang tetapi kebanyakan dari mereka dikirim ke China, rumah bordil ini disebut juga *Comfort Station* yaitu tempat di mana para *Comfort Women* dikumpulkan dan dipekerjakan. Sesampainya di China mereka akan diperiksa kesehatan intim. Kesehatan organ intim adalah catatan yang sangat penting karena nantinya dokumen itu akan diberikan kepada pusat untuk menjadi catatan berapa banyak perempuan yang bebas dari (*veneral disease*) VD, yaitu penyakit menular melalui hubungan seksual (Putri, 2018). Pasca berakhirnya perang dunia, masyarakat dari negara-negara bekas jajahan Jepang banyak menuntut kebijakan kejam yang dilakukan Jepang sebagai kejahatan perang, dengan tuntutan permintaan maaf resmi dan bentuk tindakan tanggung jawab dari pihak Jepang atas wanita negara lain yang menjadi korban kejahatan perang saat itu (Adityani, 2018). Adapun negara yang sangat tegas dalamuntutannya terhadap kejahatan perang Jepang salah satunya dari Korea Selatan, dimana masyarakat di sana sangat serius dalam menyuarakan dan menuntut keras kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang di masa lalu (Indrakorniawan, 2023). Setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat, Pemerintah Korea Selatan akhirnya mengambil tindakan tegas mengenai isu *Comfort Women* ini, Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan ancaman akan memutuskan hubungan diplomatik Jepang dengan Korea Selatan jika pemerintah Jepang tidak mengakui keterlibatan Pemerintah Jepang dalam kasus *Comfort Women*. Pemerintah Jepang berusaha memberi alasan kuat mengapa *Comfort Women* ini dibentuk, yaitu Jepang ingin pandangan masyarakatnya terhadap militer Jepang kembali membaik usai peristiwa "*rape of nankin*" dengan memenuhi kebutuhan tentara Jepang terkait dengan wanita, lalu Jepang mencoba meminimalisir masalah kesehatan bagi para tentaranya dikarenakan di *Comfort Station* ini para wanita selalu diperhatikan kebersihan dan kesehatannya sehingga potensi tentara Jepang terkena penyakit saat melakukan hubungan seksual berkurang dan terakhir alasan pemerintah Jepang adalah mencegah para tentara Jepang pergi ke tempat prostitusi di negaranya agar tidak dilihat oleh

masyarakat yang akan merusak citra tentara Jepang. Setelah mendengar alasan Jepang membuat kebijakan *Comfort Women*, membuat masyarakat Korea Selatan menimbulkan sentimen dan persepsi negatif terhadap negara Jepang, hal ini juga menimbulkan kesenjangan antara kedua belah negara, bahkan dapat dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Koran Donga di Korea Selatan pada tahun 1990, 66% responden menyatakan tidak menyukai Jepang, lalu pada survei berikutnya terkait hal yang sama dilakukan hingga tahun 2005 persentase ketidaksukaan masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang ini selalu tinggi dengan hasil yang selalu melebihi angka 50% masyarakat Korea Selatan yang tidak menyukai Jepang (Adityani, 2018).

Sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Korea Selatan akibat tidak adanya progres dari Pemerintah Korea Selatan sendiri terkait penanganan lanjutan kasus *Comfort Women* ini. Masyarakat Korea Selatan terutama kaum perempuan di sana mulai membuat organisasi hingga komunitas solidaritas sendiri lalu melakukan aksi demonstrasi dengan tujuan agar menyuarakan suara dari korban kasus *Comfort Women* (Indrakorniawan, 2023). Terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan demonstran dari masyarakat serta komunitas di Korea Selatan. Hal ini juga mendorong 37 kelompok gerakan wanita di Korea dan kelompok aktivis di Korea Selatan untuk bersatu dan membentuk *The Korean Council for the Women Drafted for Sexual Slavery* atau dalam Bahasa Korea disebut *Jeong-Daeh-Yeob* sebagai *women redress movement* (Putri, 2018). Para kelompok dan komunitas wanita Korea Selatan juga melakukan aksi unjuk rasa mingguan yang dilakukan setiap hari Rabu atau yang biasa disebut *Wednesday Demonstrations*. Aksi ini semakin besar tiap tahunnya hingga puncaknya terjadi pada tahun 2011, di mana saat itu para demonstran membangun patung *Comfort Women* sebagai simbol dari para korban *Comfort Women* yang dibangun tepat di seberang kedutaan Jepang di Korea Selatan, yang kemudian mengundang reaksi keras pemerintah Jepang untuk segera membahas masalah ini (Adityani, 2018). Pada 28 Desember 2015, Jepang melakukan pertemuan kembali dengan Korea Selatan guna membahas kembali penyelesaian kasus *Comfort Women*, dikarenakan Pemerintah Jepang merasa tekanan dari aksi masyarakat dan komunitas solidaritas *Comfort Women* Korea Selatan sudah mulai membesar. Pihak Korea Selatan resmi mengeluarkan hasil pertemuan dengan Jepang berupa perjanjian damai antara kedua belah pihak yang disebut *ROK – Japan Comfort Women deal* atau *The Agreement on Comfort Women* (Dyansa, 2018).

Walaupun sudah terbentuknya perjanjian *Comfort Women Agreement* ini, masih banyak kelompok solidaritas dan masyarakat Korea Selatan yang masih melakukan aksinya, salah satunya membangun patung-patung *Comfort Women*. Pemerintah Korea Selatan berjanji akan melakukan diskusi dengan kelompok solidaritas di Korea Selatan terkait penurunan patung tersebut, tetapi hingga 2017 patung tersebut tidak kunjung diturunkan, bahkan patung baru bertambah di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan yang baru saja dibangun di Busan, sehingga perjanjian ini masih belum efektif untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* (Ibrahim dan Rezasyah, 2021). Presiden Korea Selatan Moon Jae-In mengatakan bahwa alasan mengapa kasus ini belum selesai dikarenakan masih banyak masyarakat terutama kelompok yang belum puas atas perjanjian *Aggrement on Comfort Women* ini, karena masih banyak tuntutan dari para demonstran yang belum terpenuhi dan banyak alasan lain, lalu masyarakat juga berjanji tidak akan berhenti melakukan unjuk rasa walau *Agreement on Comfort Women* ini sudah disepakati dan ditanda tangani (Dyansa, 2018). Dalam tulisan ini, Penulis melihat bagaimana besarnya pengaruh peran masyarakat Korea Selatan yang melakukan banyaknya aksi gerakan sosial berupa demonstrasi,

pembangunan patung *Comfort Statue* dan juga membentuk komunitas solidaritas *Comfort Women*. Semua aksi ini tercipta karena trauma Masyarakat Korea Selatan dari memori kolektif di masa lalu yang terbentuk akibat kebijakan *Comfort Women* yang dilakukan Jepang saat menuduki Korea Selatan. Aksi-aksi tersebut kemudian membuat Jepang dan Korea Selatan terus berupaya dalam rekonsiliasi penyelesaian isu *Comfort Women* ini guna memulihkan hubungan kedua negara.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk kebijakan (Moleong, 2002). Sementara itu, Sugiono menjelaskan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Sugiyono, 2019). Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini akan memaparkan sejumlah data deskriptif terkait peran masyarakat Korea Selatan dalam pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan kasus *Comfort Women*.

## **KERANGKA PENELITIAN**

Untuk melihat penyebab mengapa isu masa lalu seperti *Comfort Women* ini mampu mempengaruhi hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang, dan juga mengapa masyarakat Jepang masih sangat marah dan menyalahkan Jepang atas masalah di masa lalu dan pada akhirnya masyarakat Korea Selatan membentuk sebuah gerakan, sehingga penelitian ini menggunakan konsep *memory, trauma, and world politics* menurut pemikiran Duncan Bell untuk menjelaskan mengenai pentingnya pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan keadaan di masa sekarang, lalu penelitian ini juga menggunakan konsep *social movement* untuk melihat bagaimana aksi dari gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah Jepang dan Korea Selatan, dan penelitian ini akan menggunakan konsep rekonsiliasi terkait penyelesaian konflik *Comfort Women* dan juga untuk melihat bagaimana proses perbaikan hubungan bilateral dari Jepang dan Korea Selatan pasca isu *Comfort Women* dan juga dimana sebelumnya Korea Selatan mengancam akan memutuskan hubungan diplomasi dengan Jepang.

### ***Memory, Trauma, And World Politics* menurut Duncan Bell**

Menurut konsep ini memori adalah proses dimana ingatan mengenai kejadian yang berasal dari masa lalu dapat mempengaruhi apa yang terjadi di masa sekarang, kemudian secara khusus Bell juga mendefinisikan memori kolektif atau *collective memory* sebagai

persepsi bersama akan sejarah atau masa lalu, korelasi akan pentingnya memori dan trauma dengan preferensi negara di masa sekarang adalah memori akan trauma di masa lalu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi politik (Bell, 2006), afiliasi, dan tindakan negara dalam praktiknya, kebijakan atau tindakan yang diambil negara dapat merupakan hasil atau bagian dari memori kolektif atau kenangan akan masa lalu yang mendarah daging dalam negara tersebut, yang kemudian mendasari persepsi politik dan kebijakan yang diambil negara hal ini dikarenakan luka yang disebabkan oleh trauma, biasanya tidak mudah untuk disembuhkan yang kemudian mendorong berbagai tindakan untuk menunjukkannya sehingga memori akan trauma tersebut kemudian menyebar dari satu orang ke orang lainnya dalam masyarakat tersebut (Bell, 2006). Adapun terkait “teori trauma”, pertama kali muncul dalam bukunya Caruth, *Unclaimed Experience* dalam arti asli, trauma berasal dari kata Yunani *tráuma* yang mengacu pada “luka” atau cedera tubuh. Tetapi, penggunaan kata trauma saat ini lebih mencerminkan pada luka pikiran daripada luka tubuh, trauma ini sebagai respon terhadap pengalaman atau peristiwa luar biasa yang mendadak atau sebuah bencana dalam bentuk halusinasi berulang yang tidak terkendali dan fenomena intrusif lainnya di masyarakat. Caruth menegaskan bahwa fenomena ini kembali mengganggu di kemudian hari dengan simtom-simtom, antara lain mimpi buruk di masa lalu, dan fenomena repetisi lainnya (Arofah, 2020).

### **Social Movement**

*Social Movement* atau yang sering disebut gerakan sosial adalah sebuah bentuk aksi bersama yang terorganisir bertujuan untuk menyuarakan tujuan, protes, dan apapun hal yang mempengaruhi struktur sosial, juga adanya beberapa ciri suatu gerakan sosial yang diantaranya adanya tujuan yang ingin dicapai (sasaran) terencana serta terdapat suatu ideologi (Haris, 2019). Sydney Tarrow berpendapat Gerakan sosial adalah suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan bersama, rasa solidaritas sosial, dan interaksi sosial yang berkelanjutan antara paran penentang dengan pemegang wewenang. Dalam pembahasan terkait gerakan sosial ini banyak sekali para pakar sosial yang memberikan definisi dari gerakan sosial ini, salah satunya dari Anthony Giddens yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai suatu tujuan bersama melalui gerakan kolektif (*collective action*) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Suharko, 2006). Adapun dua sisi yang sangat terlihat dari beberapa definisi tentang gerakan sosial ini, pertama adanya upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan didalam kelembagaan melalui gerakan sosial yang melibatkan tantangan kolektif, tantangan tersebut sering kali berfokus pada kebijakan-kebijakan publik atau diarahkan sebagai patokan mengawali perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga sosial dan politik distribusi jaminan sosial, serta konseptualisasi mengenai hak-hak dan tanggung jawab sosial dan politik. Kedua gerakan sosial memiliki tujuan bersifat politis, dalam kaitannya mencakup perubahan di dalam (Suharko, 2006). Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengendarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata dengan cara menggerakkan konsensus, perancang gerakan memainkan peranan penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam itu namun para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih

dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama (Akbar, 2016).

## **Rekonsiliasi**

Selain konsep *memory, trauma, and world politic*, dan *social movement* penulis juga menggunakan konsep *Rekonsiliasi* untuk melihat bagaimana pemerintah Jepang dan Korea Selatan menyelesaikan masalah terkait isu *Comfort Women* dan memperbaiki hubungan bilateral dari kedua negara, rekonsiliasi di definisikan adalah bentuk dari penyelesaian masalah untuk mengembalikan hubungan bilateral maupun multilateral, rekonsiliasi adalah cara menangani atau menyelesaikan suatu konflik dengan cara berunding atau melakukan mediasi melalui institusi atau perantara sosial, melakukan rekonsiliasi juga bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi dan permintaan maaf dari salah satu pihak yang terlibat untuk mendapatkan persetujuan atau titik terang dari penyelesaian masalah yang akan diselesaikan selain itu dapat menjadi jaminan untuk tidak terjadinya masalah yang sama kedepannya. Disamping pelaksanaan rekonsiliasi juga memiliki kegunaan dalam memulihkan hak dan nilai kemanusiaan bagi negara yang terlibat, selain itu rekonsiliasi juga membantu, penyelesaian dan kesadaran dari negara atau kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi sehingga timbul rasa yang membuat kedua kelompok tidak akan mengulang konflik yang sama, walau dengan jaminan yang baik terhadap hasil dari rekonsiliasi tetapi dibutuhkan proses yang lama agar rekonsiliasi ini berjalan dengan baik dikarenakan dibutuhkan syarat syarat agar rekonsiliasi ini dapat terlaksana yaitu pengakuan, permintaan maaf, lalu basis moral bersama, komitmen tindakan penyembuhan secara psikologis, dan reparasi pelembagaan kerjasama, syarat rekonsiliasi ini berfungsi untuk memperbaiki relasi untuk pihak konflik kepada masyarakat yang melalui proses atas ke bawah.

## **SEJARAH KEBIJAKAN COMFORT WOMEN**

Mayoritas *Comfort Women* adalah perempuan yang berasal dari Korea Selatan, hal ini dikarenakan faktor fisik perempuan Korea Selatan yang memiliki kemiripan dengan perempuan di Jepang sehingga perempuan Korea Selatan paling banyak diminati dan diculik untuk dijadikan *Jugun lanfu* (Dinda, 2018). Kasus penculikan perempuan Korea Selatan ini sebenarnya sudah terjadi semenjak awal kolonialisme Jepang di tanah Korea pada tahun 1910, tetapi sistem *Comfort Women* ini pun dibentuk setelah terjadinya peristiwa *rape of nankin* atau *shanghai incident* pada tahun 1937, saat Jepang menginvasi Manchuria dan berkembang ke wilayah Tiongkok. Pada saat itu untuk mematahkan semangat perlawanan Tiongkok, pemerintah Jepang memerintahkan agar kota Nanking dihancurkan, lalu Jepang memperkosa sedikitnya 20.000 perempuan (Barnard, 2001).

Setelah kasus itu, sebagai bentuk cara memperbaiki reputasi Jepang pasca peristiwa Nanking, Jepang membangun fasilitas rumah bordil yang disebut *navy ianjo* atau *comfort station*. Tujuan dibangunnya rumah bordil tersebut sebagai metode pencegahan (*venereal disease*) VD, lalu mencegah tentara melakukan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan lokal dan dioperasikan di bawah pengawasan ketat otoritas angkatan laut serta kantor Konsulat Jenderal. Berdasarkan para pakar sejarah Korea Selatan tidak bisa

memastikan jumlah pasti korban *comfort women*, diduga jumlah mereka mencapai 50.000 sampai 200.000 orang (Bang-Soon L, 2010). Berdasarkan peneliti sejarah, *comfort woman* dihitung kurang lebih sebanyak 200.000 orang, yang mana 80% terdiri dari wanita Korea Selatan, sedangkan sisanya terdiri dari wanita yang berasal dari Indonesia, China, Malaysia, Filipina, Belanda, hal yang membuat perempuan Korea Selatan menjadi favorit selain karena penampilan mereka yang memiliki ciri fisik yang sama dengan perempuan Jepang, perempuan dari Korea Selatan juga diminati karena bahasa mereka yang masih lebih mudah untuk dipahami dibanding bahasa negara lain, sehingga memudahkan tentara Jepang untuk berkomunikasi dengan para *jugun ianfu* asal Korea Selatan (Lai, 2002).



Setelah dibangunnya *Comfort Station* para tentara Jepang mulai menculik para perempuan dari wilayah kolonialnya terutama di Korea Selatan, biasanya tentara Jepang akan menggunakan cara menawarkan pendidikan dan pekerjaan kepada perempuan Korea Selatan, setelah itu mereka mulai menculik dan membawa perempuan Korea Selatan dengan kereta, di dalam kereta tentara Jepang mengancam akan membunuh anak dan kerabat korban *Comfort Women* jika mereka melakukan perlawanan (Gracellia, 2020). Usai dibawa ke *Comfort Station*, yang berada di setiap kamp tentara di berbagai negara jajahan Jepang baru di situlah para *Comfort Women* dipaksa untuk melayani tentara Jepang. Menurut pengakuan mantan *Comfort Women*, Kimiko Kaneda, dalam sehari dia dan perempuan lain harus mau melayani 20 tentara menurut penuturannya, jika mereka menolak melayani maka tentara Jepang akan memaksa, memukulinya. Tidak hanya dipukuli perempuan yang menjadi *Comfort Women* juga diberi pakaian dan alat rias oleh pemilik rumah bordil tetapi tidak diberi uang maupun upah lainnya (The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, 2013). Peristiwa yang terjadi berulang kali selama bertahun-tahun ini tentu saja meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi para korban, banyak dari para korban *Comfort Women* yang akhirnya mati dibunuh maupun bunuh diri akibat tidak tahan dengan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang.

### **Respon Korea Selatan Terhadap Isu *Comfort Women***

Pasca perang dunia banyak sekali negara-negara yang meminta pertanggung jawaban dari Jepang atas kejahatan perang yang mereka lakukan, tetapi Jepang mengalihkan orientasinya sebagai negara yang berfokus untuk memperbaiki ekonomi dibawah kepemimpinan Yoshida, untuk itu Jepang berusaha membangun hubungan dengan negara-



negara Asia Timur, khususnya Korea Selatan, rangkaian upaya normalisasi hubungan dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan. Akhirnya dibuat sebuah perjanjian yang menjadi tonggak keterhubungan dua negara tersebut pada tahun 1965 dengan nama *Treaty on Basic Relationship*. Pada perjanjian itu berisi beberapa kesepakatan terkait kerjasama ekonomi dan penyelesaian terkait properti dan hak asasi korban sebesar 800 juta dollar yang akan diberikan Jepang kepada Korea Selatan (Indrakorniawan, 2023).

Korea Selatan yang sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan kejahatan perang Jepang yang pernah terjadi di Korea Selatan ingin menyetujui upaya normalisasi yang dilakukan oleh Jepang, tetapi pandangan masyarakat yang berbeda melihat ini menuntut pemerintah Korea Selatan agar tegas menyikapi dan mengangkat kembali isu *Comfort Women* untuk diselesaikan, dan pada akhirnya sebelum dilaksanakannya perjanjian hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan, pihak Korea Selatan menuntut agar kasus *Comfort Women* ini kembali dibahas, dikarenakan banyak sekali alumni *Comfort Women* yang sulit untuk hidup normal dikarenakan trauma akan masa lalu mereka sebagai *jugun ianfu*, dan harus mengembalikan kepercayaan dirinya akibat trauma terhadap memori gelap yang mereka miliki, pemerintah Korea Selatan sempat memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan, khususnya alumni *Comfort Women* dimulai pada akhir tahun 1980. Demokratisasi Korea Selatan memungkinkan media lebih kritis dalam menyuarakan situasi kolonial Jepang bersamaan dengan kampanye feminis untuk hak-hak perempuan. Kisah korban yang merebut perhatian masyarakat dan memerintahkan agar para korban lebih berani untuk memberikan kesaksian dan bersama untuk menuntut Jepang agar memberikan tanggung jawabnya sebagai pelaku kejahatan perang dan melanggar nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam hukum kebiasaan internasional (Gracellia, 2020).

Korea Selatan dalam kasus ini terus mendorong semua media cetak maupun media elektronik agar terus mengangkat isu ini bahkan dalam ratusan wawancara alumni *Comfort Women*, terdapat beberapa kesamaan pengakuan yaitu para wanita tersebut direkrut tanpa persetujuan dari dirinya sehingga masalah ini bukanlah masalah prostitusi tetapi soal perbudakan seksual. Para wanita tersebut dipaksa untuk melayani 20 hingga 30 personil militer (Gracellia, 2020). bukan hanya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tetapi para korban juga dipukuli dan menerima berbagai macam tindakan kekerasan sehingga ada yang sampai mati, cacat fisik hingga cacat psikologi (Gracellia, 2020).

### **Rekonsiliasi Isu *Comfort Women* antara Korea Selatan dan Jepang**

Semenjak penandatanganan *Treaty on Basic Relationship Korea – Japan* pada tahun 1965, banyak pihak yang menganggap permasalahan isu *Comfort Women* antara Korea Selatan dan Jepang sudah selesai, dimana diperjanjian tersebut Jepang juga sudah memberikan kompensasi sebesar 800 juta dollar, sayangnya oleh pemerintah Korea Selatan tidak menyalurkan itu untuk para korban alumni *Comfort Women*, tetapi digunakan untuk biaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan fasilitas negara, walau demikian masyarakat Jepang banyak yang beranggapan bahwa pemberian kompensasi saja tidak cukup, dimana banyak tuntutan dari masyarakat Korea Selatan harus direalisasikan. Jepang yang merasa tidak sepenuhnya salah tetap mengatakan bahwa tragedi *Comfort Women* tidak sepenuhnya kesalahan mereka dan mengatakan pemerintah Jepang tidak ada campur tangan dikebijakan tersebut, dan mengatakan tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan Jepang bersalah, pada akhirnya banyak gugatan dari seluruh perwakilan *Comfort Women* yang menuntut

pertanggung jawaban Jepang, salah satu tuntutan dari alumni *Comfort Women* Korea Selatan adalah dimana Jepang harus memberikan minimal uang kompensasi finansial 2.500 dollar/orang (Ferguson, 2015).

Dalam situasi ini, Jepang masih belum mengakui kesalahannya kepada Korea Selatan. Secara hukum, Jepang tidak bertanggung jawab atas *Comfort Women*. Pada tahun 1997, Shinzou Abe mengeluarkan pernyataan bahwasannya pemerintahan Jepang tidak seharusnya bertanggung jawab terhadap *Comfort Women*, karena para wanita Korea Selatan tidak dipaksa melakukan pekerjaan sebagai *Comfort Women* melainkan mereka sendiri yang memiliki keinginan untuk mengambil pekerjaan tersebut, sehingga Jepang menolak memberikan kompensasi terhadap korban *Comfort Women* walaupun ada juga tekanan dari luar (Ferguson, 2015).

Tuntutan dan tekanan yang terus datang dari masyarakat dan pemerintah Korea Selatan membuat Jepang terus mencari cara agar masalah ini dapat diselesaikan, tidak hanya dari masyarakat Korea Selatan saja, Jepang juga mengalami tekanan dari luar, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pun mulai bergerak dan mengangkat kasus ini, PBB memasukan isu ini kedalam agenda rapat di Swiss pada Agustus 1992. Hasilnya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengemukakan keras apa-apa yang sudah dilakukan Jepang kepada masyarakat Korea Selatan saat Perang Dunia II yang berlawanan dengan perjanjian internasional yang sudah disetujui oleh pemerintah Jepang untuk melawan sistem kerja paksa yang ditanda tangani pada tahun 1932, kemudian dengan hasil yang tidak kunjung membaik akhirnya Jepang membentuk (*Asian Women Fund*) AWF sebagai bentuk rekonsiliasi Jepang terhadap seluruh korban di negara jajahannya termasuk Korea Selatan (*Asian Women's Fund*, 2018).

*Asian Women Fund* atau yang disebut AWF ini kemudian resmi mengeluarkan ketetapan bersama, bahwa di sini dari pihak Pemerintah Jepang siap untuk memberikan dana sebesar 2 juta yen bagi para bekas korban *Comfort Women*, dikarenakan pemerintah Jepang merasa bahwa kejahatan ini melibatkan nama negara, dana ini dikumpulkan dari sumbangan seluruh masyarakat Jepang sebagai bentuk permintaan maaf yang tulus tanpa mengatasnamakan pemerintah sendiri dan bukan hanya uang tetapi pemerintah Jepang juga siap menanggung proyek bantuan kesehatan dan kesejahteraan dari para korban *Comfort Women*, dan rencananya akan langsung dikirimkan oleh perdana menteri dan presiden AWF saat itu. Berbagai macam respon didapatkan oleh AWF dari berbagai macam pihak di Korea Selatan maupun Jepang atas kebijakan uang kompensasi yang dikirimkan oleh Jepang kepada para korban *Comfort Women*, tidak sedikit dari masyarakat Jepang beranggapan bahwa mereka direpotkan oleh dosa yang dilakukan orang lain di masa lalu yang dirasa itu biasa terjadi dimedan perang, dan dari pihak Korea Selatan sendiri masih tetap menolak uang kompensasi ini, komunitas solidaritas *Comfort Women* Korea Selatan dan *Korea Council* merasa bahwa uang yang kirimkan ini belum memenuhi seluruh tuntutan yang diinginkan pihak Korea Selatan, karena yang mereka inginkan adalah kompensasi hukum yang di jatuhkan terhadap pelaku *Comfort Women* (Haruki, 2008).

### **Gerakan Masyarakat Korea Selatan**

Salah satu instrument dalam gerakan sosial adalah masyarakat, begitu juga yang ada didalam proses penyelesaian isu *Comfort Women* yaitu dimana Masyarakat berperan sebagai

aktor sosial yang berfokus untuk menyuarakan tuntutan pertanggung jawaban Jepang terhadap para alumni korban *Comfort Women* yang masih hidup, komunitas solidaritas *Comfort Women* dengan sukarela melakukan segala bentuk upaya penyelesaian dan permintaan tuntutan kepada Jepang, maka sebagai bagian dari *Transnational Civil Society*, solidaritas *Comfort Women* Korea Selatan telah melakukan berbagai macam aktifitas baik yang dilakukan di wilayah nasional hingga lintas negara. Ini juga salah satu bentuk dari memori kolektif dari apa yang terjadi di masa lalu dimana para solidaritas *Comfort Women* dan juga para korban *Comfort Women* sangat dibuat takut atas apa yang terjadi pada saat pembantaian dari kebijakan *Comfort Women* ini dan tidak ingin adanya kejadian yang sama lagi kembali terjadi di masa depan.

Setelah tidak adanya tindakan lanjutan dari pemerintah Korea Selatan terkait penyelesaian kasus *Comfort Women* ini dan bahkan progress yang tidak terlihat untuk penyelesaian ini secara langsung, akhirnya masyarakat Korea Selatan khususnya para perempuan langsung turun ke jalan, dan juga hal ini mendorong 37 kelompok gerakan wanita di Korea dan kelompok aktivis untuk bersatu dan membentuk *The Korean Council for the Women Drafted for Sexual Slavery* atau dalam Bahasa Korea disebut *Jeong-Daeh-Yeob* sebagai *women redress movement*, kemudian *Jeong-Daeh-Yeob* mengeluarkan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Jepang adalah pertama pengakuan secara fakta historis bahwa Jepang bersalah karena memaksa perempuan di negara bekas kedudukan kolonial Jepang, terutama Korea Selatan untuk menjadi *Comfort Women* di daerah peperangan dan Jepang harus meminta maaf atas fakta tersebut, kedua investigasi penuh atas *Japanese military of Comfort Women system* dan publikasikan penuh atas hasil investigasi tersebut, ketiga kompensasi finansial bagi *Comfort Women* yang masih hidup serta pertanggung jawaban penyembuhan kesehatan baik secara fisik dan mental, terakhir adalah janji dimana tidak akan muncul nya peristiwa yang sama dimasa depan dan tidak akan mengungkit apapun yang berhubungan dengan *Comfort Women* (Adityani, Susiatiningsih, & Paramasatya, 2018).

Banyaknya aktivitas yang dilakukan solidaritas *Comfort Women* dari dalam negara maupun lintas negara yang membuat isu ini terus terangkat sebagai bentuk tanda protes akibat tidak adanya tindakan lanjutan dari pemerintah Korea Selatan dan menganggap pemerintah terlalu acuh terhadap kasus ini oleh sebab itu munculah aksi demonstran besar-besaran dan disusul oleh aksi-aksi yang lain di mana sebagai wujud tuntutan atas tidak adanya proses dari pemerintah Korea Selatan dan Jepang terkait penyelesaian isu *Comfort Women*.

### ***Wednesday Demonstrations***

Aksi *Wednesday Demonstrations* merupakan sebuah demonstrasi rutin yang dilakukan sebagai upaya penuntutan pertanggung jawaban pemerintah Jepang agar isu dan nasib perempuan *Comfort Women* di Korea Selatan segera terselesaikan, aksi ini pertamakali dilakukan pada 8 Januari 1992 pasca pencapaian kelompok solidaritas *Comfort Women* dalam menyponsori kemunculan Kim Hak-Sun, penyelenggaraan aksi ini sengaja dilakukan bertepatan pada saat perdana menteri Jepang Kiichi Miyazawa berkunjung ke Korea Selatan (Kazuko, 1994).

## **Aksi Peletakkan *Comfort Women Statue* atau *Pyonghwa-bi***

Aksi yang sempat mengundang perhatian dunia khususnya Jepang dan Korea Selatan dimana aksi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Korea yaitu aksi pembangunan *Comfort Women Statue*, untuk pertamakalinya aksi ini dilakukan pada saat peringatan 1000th Wednesday Demonstration dengan meletakkan sebuah patung di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul (Straitstimes, n.d). Dalam bahasa Korea patung tersebut dikenal dengan *Pyonghwa-bi* atau disebut juga dengan *Statue of Peace*. Patung ini adalah bentuk simbolis dari kesedihan perempuan Korea Selatan yang menjadi korban pelecehan militer Jepang (Putri, 2018). Patung ini dibangun banyak tempat di Korea Selatan, yang pertama terletak tepat di depan Gedung kedutaan besar Jepang di Korea Selatan, tidak hanya di Seoul tetapi patung ini juga dapat ditemukan di Busan dan Beberapa tempat diseluruh Korea Selatan, patung ini selalu ada di tepi jalanan Korea Selatan.

## **Membentuk *Asian Women Solidarity***

Selain melakukan aksi-aksi wilayah nasional, solidaritas *Comfort Women* Korea Selatan kemudian menginisiasi pembentukan *Transnational Comfort Women Advocacy Network* yang disebut dengan *Asian Women Solidarity (AWS)*. AWS sendiri terdiri dari para aktor *civil society* yang masing masing adalah negara korban dari *Comfort Women* seperti solidaritas *Comfort Women* Filipina, Hongkong, Malaysia dan juga Indonesia (Kwon, 2015). AWS sendiri tidak hanya melakukan penuntutan atas pertanggung jawabab dari Jepang, tetapi misa utama AWS adalah melakukan kampanye transnasional untuk mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian dan HAM, termasuk kampanye anti kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik agar praktik serupa seperti *Comfort Women* tidak terulang dikemudian hari. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 1992 AWS untuk pertama kalinya menyelenggarakan *Asian Women Solidarity Forum* di Seoul Korea Selatan yang dihadiri oleh delegasi dari Filipina, Jepang, Taiwan, Thailand dan Hong-Kong. Kemudian, pada Oktober 1993 AWS menyelenggarakan forum ke-2 di Tokyo Jepang yang disponsori oleh LSM *Comfort Women* di Jepang dan pada Februari 1995 forum ke-3 kembali diadakan di Seoul (Kwon, 2015). Melalui forum tersebut para negara korban yang tergabung akan saling berdiskusi dan berkomunikasi terkait dengan pengembangan strategi penuntutan terhadap pihak pemerintah Jepang. Selain itu AWS juga aktif dalam berbagai forum PBB, seperti bergabung pada Juni 1993 melakukan Joint Symposium dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina. Menjadi pembicara dalam berbagai forum PBB untuk mengungkapkan secara langsung tuntutan mereka terhadap pemerintah Jepang dan lain sebagainya.

## **Menjalin Solidaritas dengan Komunitas Internasional**

Solidaritas *Comfort Women* Korea Selatan sendiri juga aktif menjalin komunikasi dengan organisasi-organisasi internasional diantaranya seperti aktif berkomunikasi dengan *The International Commission of Jurists (ICJ)* atau Komisi Internasional Ahli Hukum dimana sebagaibentk dukungan ICJ terhadap solidaritas *Comfort Women* Korea Selatan, ICJ mengirimkan ahli hukumnya untuk membantu tim pencari fakta solidaritas *Comfort Women*

Korea Selatan dalam *Korean Council* untuk melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan Jepang dalam pengoperasian sistem *Comfort Women*. Laporan dari ICJ kemudian dipresentasikan kepada Kelompok Kerja untuk Bentuk-bentuk Perbudakan Kontemporer (*Contemporary Forms of Slavery*) pada Mei 1993 dan laporan tersebut kemudian diserahkan pada Sub-Komisi PBB (Kwon, 2015).

Selain ICJ, *Catholic Institute for International Relations* atau Institut Katolik untuk Hubungan Internasional yang berbasis di London juga mengundang solidaritas *Comfort Women* Korea Selatan untuk mempresentasikan studi kasus *Comfort Women* dimana hasil dari aktivitas tersebut telah membuat Keuskupan Agung Katolik Osaka menjadikan isu *Comfort Women* sebagai subyek kampanye perdamaian mereka serta melakukan konferensi pers mendesak Jepang untuk segera melakukan pertanggung jawaban. Solidaritas *Comfort Women* juga aktif melakukan diskusi dengan *European Women*, seperti berpartisipasi dalam Simposium Internasional di Jerman dengan tema "*Human Dignity and Women in War and Rape*". Dalam forum tersebut solidaritas memutuskan bahwa masalah gender dan kekerasan terhadap perempuan selama konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia dapat dihentikan dengan cara persatuan solidaritas seluruh dunia (Kwon, 2015).

## **REKONSILIASI AKHIR MELALUI *COMFORT WOMEN AGREEMENT* TAHUN 2015**

Setelah terus mendapat tekanan dari demonstran dan solidaritas masyarakat Korea Selatan melalui seluruh upaya penuntutan mereka, akhirnya pada 29 Desember 2015 merupakan hari yang paling bersejarah bagi Korea Selatan dan Jepang, karena pada hari itu kedua negara telah resmi menandatangani sebuah perjanjian, yaitu hasil pertemuan rekonsiliasi Korea Selatan dengan Jepang berupa perjanjian damai antara kedua belah pihak yang disebut *ROK – Japan Comfort Women deal* atau *The Agreement on Comfort Women*.

Secara garis besar poin dari perjanjian *ROK – Japan Comfort Women deal* atau *The Agreement on Comfort Women* adalah, pengakuan Jepang atas keterlibatannya dalam pengoperasian isu *Comfort Women* dan permintaan maaf Jepang secara resmi terhadap para perempuan korban hidup *Comfort Women* Korea secara resmi (Putri, 2018). Perjanjian ini juga berisi terkait pertanggung jawaban Jepang dengan membayar dana reparasi terhadap para perempuan korban hidup *Comfort Women* Korea Selatan, namun pada pertemuan tersebut masih-masing perwakilan dari pemerintah membacakan poin-poin kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida menyatakan bahwa. Pertama, pemerintah Jepang telah sepakat untuk mengakui kesalahan masa lalu atas keterlibatannya dalam proses perekrutan dan penoperasikan sistem *Comfort Women* selama periode Perang Dunia. Kedua, Pemerintah Jepang juga akan bersedia melakukan permintaan maaf secara resmi dan formal di depan publik kepada seluruh perempuan korban hidup *Comfort Women* Korea Selatan atas kesalahannya. Ketiga, Pemerintah Jepang akan membayar 1 Milyar yen sebagai dana reparasi dan kompensasi untuk pemulihan dampak fisik dan psikis para perempuan korban hidup *Comfort Women* Korea Selatan, di mana dana tersebut akan disumbangkan melalui yayasan resmi pemerintah Korea Selatan yang dibentuk atas perjanjian tersebut. Dengan jumlah pendapatan Jepang yang cukup tinggi yaitu 93 milyar yen maka hal ini menjadi sangat memungkinkan bagi Jepang untuk memberikan kompensasi sebesar 1 milyar yen untuk pembangunan yayasan bagi 46 korban *Comfort Women* yang tersisa di Korea Selatan (BBC,

2015). Keempat, Perjanjian tersebut berdasarkan klausa '*this issue is resolved finally and irreversibly*' dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa penyelesaian isu melalui perjanjian tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun dikemudian hari dengan catatan pemerintah Jepang telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Kelima, Melalui perjanjian tersebut baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Korea Selatan tidak lagi diperbolehkan membahas isu ini dalam forum internasional termasuk forum PBB (Dinda, 2018).

## ISU COMFORT WOMEN PASCA AGREEMENT ON COMFORT WOMEN

Menurut beberapa masyarakat Korea Selatan, *Comfort Women Agreement* yang bersifat "*Final and Irreversibly*" juga sangat menguntungkan Jepang. Hal ini dikarenakan jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan, maka kecil peluang kasus ini akan terungkit kembali di masa depan (Soh, 1996). Hal ini dikarenakan jika kedua negara sepakat, maka perjanjian ini akan menjadi puncak penyelesaian permasalahan dan tidak ada perjanjian lain yang dapat menggantikan perjanjian ini. Kemudian dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa realisasi kepentingan Jepang dan Korea Selatan dalam perjanjian terlihat timpang, isi perjanjian lebih menguntungkan Jepang dari pada Korea Selatan. Hal ini dapat terlihat dari konsistennya Jepang untuk tidak secara langsung menyampaikan permintaan maaf dan memberi kompensasi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwasannya Jepang masih berpegang teguh pada perjanjian pembentukan hubungan bilateral yang tidak mengharuskan Jepang untuk memberi kompensasi secara langsung. Selain itu tidak ada pengakuan yang kuat terkait *Jugun Ianfu* yang disampaikan oleh Jepang. Jepang telah meminta maaf, namun belum secara kuat dan berani mengakui keterlibatannya dalam pengorganisasian *Jugun Ianfu*. Selain itu, perjanjian ini juga cukup politis, karena lebih mementingkan perbaikan hubungan dibanding berorientasi pada penyintas *Jugun Ianfu* sebagai objek perjanjian tersebut (Nuechterlein, 1979).

## PENUTUP

Isu *Comfort Women* adalah sejarah kelam antara Jepang dan Korea Selatan, isu tersebut adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling besar, dimana sejarahnya cukup panjang yaitu dari awal perang dunia 1 tepatnya tahun 1910 sampai akhir perang dunia kedua, dan kebijakan *Comfort Women* juga sudah memakan banyak korban tidak hanya dari Korea Selatan saja tetapi juga perempuan negara lain seperti China, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, tentu ini menimbulkan rasa trauma dan juga ketakutan akan memori kelam tersebut, tidak hanya dari masyarakat saja tetapi juga negara menerima dampak atas ketakutan dari trauma masa lalu tersebut dan membuat Korea Selatan kemungkinan memutuskan hubungan diplomatik dengan Jepang, oleh karena itu hal ini mewajibkan Jepang untuk bertanggung jawab atas kejahatan perang seperti isu *Comfort Women* ini.

Dikarenakan pemerintah yang tidak terlalu peduli dan cenderung lamban dalam mengambil keputusan terkait penegakan keadilan bagi perempuan alumni *Comfort Women* dimana mereka dalam kondisi terganggu kesehatan mental dan juga merasa trauma dan

membutuhkan segala bentuk pertanggung jawaban dari pihak pemerintah Jepang, sehingga membuat seluruh Masyarakat Korea Selatan melakukan aksi gerakan sosial dalam menuntut tanggung jawab Jepang atas isu *Comfort Women*, dan juga membuat pemerintah Korea Selatan lebih memiliki inisiatif untuk terus mencari jalan keluar untuk kasus ini,

Aksi yang dilakukan masyarakat Korea Selatan dan solidaritas *Comfort Women* ini sendiri meliputi, *Wednesday demonstration*, Pembangunan *comfort statue*, dibuatnya *war and womens human right museum*, membentuk Asian women solidarity dan terakhir membangun hubungan serta relasi dengan komunitas internasional. Pemerintah Jepang mengambil Tindakan dimana terus membuat bentuk gerakan rekonsiliasi dengan Korea Selatan terkait penyelesaian masalah isu *Comfort Women*, dimulai dari *Asian Women Faund (AWF)*, lalu perjanjian kerja sama keamanan, dan *the Agreement on Comfort Women*, tetapi selalu gagal dikarenakan masyarakat dan solidaritas *Comfort Women* belum puas dengan hasil dari rekonsiliasi isu *Comfort Women* tersebut, dan pada akhirnya setelah beberapa kali disusun ulang *ROK – Japan The agreement on Comfort Women* menjadi perjanjian yang mengakhiri isu *Comfort Women* dengan beberapa kesepakatan yang disusun ulang sesuai dengan tuntutan dari solidaritas *Comfort Women* dan masyarakat Korea Selatan, tetapi masih saja belum menyelesaikan isu *Comfort Women* ini secara menyeluruh dikarenakan setiap dilakukannya penyusunan ulang tidak ada keterbukaan terhadap pihak solidaritas *Comfort Women* sehingga menurut mereka pengambilan keputusan tidak transparan. Pada akhirnya isu ini dapat sedikit reda dikarenakan bantuan Amerika Serikat sebagai penengah dan merancang ulang kebijakan sebelumnya sesuai dengan tuntutan masyarakat Korea Selatan.

## REFERENSI

- Arifah dan Rokhman, Muh. Arif. (2020). "Memori, Trauma, Dan Upaya Rekonsiliasi Perang Teluk II Dalam Novel *Sā'atu Bagdād* Karya Syahad Al-Rāwiy". *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra*, IV(2).
- Bell, Duncan. (2006). *Memory, trauma and world politic, Reflections on the Relationship Between Past and Present*.
- Dyansa, C.S. (2018). *Kebijakan Jepang dalam Menyelesaikan Isu Comfort Women dengan Korea Selatan pada Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.
- Haris, Andi, Asyraf Bin Hj. AB Rahman dan Wan Ibrahim Wan Ahmad. (2019). "Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial". *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*. 1(1).
- Ibrahim, M. P. P., & Rezasyah, T. (2021). Advokasi dan Negosiasi: Diplomasi Hak Asasi Manusia Republik Korea Masa Pada Masa Park Geun-hye Mengenai Comfort Women. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 170-185.
- Kazuko, Watanabe. (1994). 'Military, Colonialism, and the Trafficking of Women: "Comfort Women" Forced into Sexual Labor for Japanese Soldiers'. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 26 (4).
- Moleong, Lexy. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, VIII. Bandung:Alfabeta.

Suharko. (2006). "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10(1). < <https://doi.org/10.22146/jsp.11020>>.

Utami, Tika Vidya. (2022). 'Negara-negara yang Pernah Dijajah Jepang', *Sindo News*, < <https://international.sindonews.com/read/777427/40/negara-negara-yang-pernah-dijajah-jepang-nomor-2-masih-bersitegang-1653300347>>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023.

Utomo, Y.A. (2022). Analisis Keputusan Jepang Menyetujui Comfort Women Agreement dengan Korea Selatan Pada Tahun 2015. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).